

RINGKASAN

Iqbal Kurniawan
220510251

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP
PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP
YANG BERASAL DARI LIMBAH B3 RUMAH
SAKIT DAERAH DI KABUPATEN KARO**

**(Dr. Arnita, S.H., M.H., dan Dr. Yusrizal, S.H.,
M.H.,)**

Persoalan pembuangan limbah medis berkategori Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di Kabupaten Karo telah mencapai tahap yang mengkhawatirkan, di mana ditemukan fakta hukum mengenai pencampuran limbah infeksius dengan sampah rumah tangga di Tempat Pembuangan Akhir. Penelitian ini bertujuan untuk membedah sejauh mana efektivitas otoritas daerah dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penindakan, serta mengurai hambatan yang menyebabkan norma hukum sering kali tidak memiliki daya paksa di lapangan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris melalui pendekatan kasus (*case approach*), kajian ini berupaya memotret interaksi antara aturan normatif dengan kenyataan sosiologis dalam operasional rumah sakit di wilayah tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum lingkungan di Kabupaten Karo masih terjebak pada pola yang terlalu longgar dan penuh kompromi. Dinas Lingkungan Hidup cenderung mengutamakan langkah pembinaan melalui teguran lisan maupun tertulis, tanpa berani melangkah pada sanksi yang lebih berat sebagaimana diatur dalam pasal 76 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kelemahan ini berakar pada kerapuhan struktur hukum, terutama terkait dengan nihilnya tenaga Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Lingkungan Hidup yang bersertifikat sebagaimana diatur dalam pasal 95 UUPPLH, serta terbatasnya dukungan anggaran operasional. Selain itu, ketiadaan fasilitas pengolahan limbah yang memiliki izin resmi menjadi faktor penghambat yang sangat besar bagi rumah sakit untuk mematuhi baku mutu lingkungan yang telah ditetapkan oleh negara.

Penelitian ini memberikan saran dengan adanya gagasan mengenai modernisasi pengawasan melalui sistem pelaporan elektronik guna menjamin keterbukaan data serta perlunya sentralisasi pengolahan limbah medis melalui mekanisme Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di RSUD Kabanjahe. Langkah ini diharapkan dapat memutus rantai kendala sarana sekaligus memberikan wewenang yang lebih luas bagi pengawas di lapangan untuk melakukan tindakan penindakan yang tegas. Hal ini menjadi sangat mendesak untuk dilakukan demi menjaga hak setiap warga negara atas lingkungan yang sehat serta memastikan bahwa institusi pelayanan kesehatan tidak justru menjadi sumber bahaya baru bagi masyarakat di Kabupaten Karo.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Limbah B3 Medis, Rumah Sakit, Kabupaten Karo

SUMMARY

Iqbal Kurniawan
220410251

LAW ENFORCEMENT AGAINST ENVIRONMENTAL POLLUTION ARISING FROM HAZARDOUS AND TOXIC (B3) WASTE GENERATED BY REGIONAL HOSPITALS IN KARO REGENCY

(Dr. Arnita, S.H., M.H., dan Dr. Yusrizal, S.H., M.H.,)

The issue of medical waste disposal categorized as Hazardous and Toxic Substances (B3) in Karo Regency has reached an alarming stage, evidenced by the legal fact of infectious waste being mixed with domestic waste at the Final Disposal Site. This research aims to examine the effectiveness of local authorities in performing their supervisory and enforcement functions, as well as to uncover the barriers that cause legal norms to often lack coercive power in practice.

This study utilizing an empirical juridical research method with a case approach, this study attempts to capture the interaction between normative rules and sociological realities within hospital operations in the region.

The research findings indicate that environmental law enforcement in Karo Regency remains trapped in an overly lenient and compromise-oriented pattern. The Environmental Agency tends to prioritize supervisory measures through verbal and written warnings, without having the courage to proceed to more severe sanctions as stipulated in Article 76 of Law Number 32 of 2009 on Environmental Protection and Management. This weakness stems from the fragility of the legal structure, particularly the absence of certified Civil Servant Investigators (PPNS) for Environmental Affairs as regulated under Article 95 of the same law, as well as limited operational budget support. Furthermore, the absence of officially licensed waste treatment facilities constitutes a major obstacle for hospitals in complying with the environmental quality standards established by the state.

This study proposes the modernization of supervision through an electronic reporting system to ensure data transparency and the necessity of centralizing medical waste treatment via the Regional Public Service Agency (BLUD) mechanism at Kabanjahe Regional Hospital. This step is expected to break the chain of infrastructural constraints while providing broader authority for field inspectors to take decisive enforcement actions. This is highly urgent to ensure every citizen's right to a healthy environment and to guarantee that healthcare institutions do not become new sources of danger for the people of Karo Regency.

Keywords: Law Enforcement, Medical Hazardous and Toxic Waste, Hospitals, Karo Regency